



Original Article

Agenda Setting Media di Garut dalam Pemberitaan Ramah Anak

Muhamad Erfan^{1✉}, Feri Purnama²

^{1,2}Universitas Garut

Correspondence Author: erfan@uniga.ac.id✉

Abstrack:

The implementation of media support for children's rights in Indonesia through the Child Friendly Reporting Guidelines as part of the mandate of Press Law No. 40 of 1999 is increasingly facing major challenges, especially when digital media technology is increasingly developing and sophisticated in the dissemination and reception of information to the public. This study analyzes the media agenda in Garut Regency in the implementation of editorial work based on child-friendly reporting guidelines in promoting public agendas and policy agendas in realizing the guarantee of children's rights in Garut. The purpose of this study is to provide a general overview, evaluative structure, and editorial work patterns in the implementation of child-friendly reporting. This study uses a qualitative approach. Data were collected through qualitative observations, interviews, and qualitative document collection. The results of this study are Agenda Setting Media in Garut is committed to implementing child-friendly reporting through a media agenda which then encourages strengthening the public agenda so that the situation further strengthens the policies of authority holders and public opinion in an effort to improve decent areas and prioritize children's rights.

Keywords: Agenda Setting; Media di Garut; Child Friendly Reporting

Abstrak:

Implementasi media yang berpihak terhadap hak-hak anak di Indonesia melalui Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) sebagai bagian dari amanat Undang-undang Pers No.40 tahun 1999 semakin menghadapi tantangan besar terutama ketika lahirnya media digital dengan semakin canggihnya teknologi penyebaran dan penerimaan informasi kepada publik. Penelitian ini menganalisa agenda media di Garut dalam pemberitaan ramah anak yang mendorong pada agenda publik dan agenda kebijakan dalam menjaga hak-hak anak di Garut. Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran umum, struktur evaluatif, pola kerja redaksi dalam implementasi pemberitaan ramah anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi kualitatif, wawancara, dan pengumpulan dokumen kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Agenda Setting Media di Garut berkomitmen dalam mengimplementasikan pemberitaan ramah anak melalui agenda media yang kemudian mendorong penguatan agenda publik sehingga situasi tersebut semakin menguatkan kebijakan pemegang wewenang dan opini publik dalam upaya meningkatkan daerah layak dan mementingkan hak-hak anak.



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Kata Kunci : Agenda Setting; Media di Garut; Pemberitaan Ramah Anak

Pendahuluan

Media sebagai kontrol sosial merupakan elemen penting di negara Demokrasi, maka dari itu tidak berlebihan jika Media Massa atau Pers merupakan pilar keempat demokrasi. Meskipun memang terkadang peran kritis pers masih terkadang terdistraksi dengan urusan ekonomi, sosial, pendidikan maupun politik media atau pemegang saham di industri pers tersebut. Komitmen media dalam mengimplementasikan peran pers yang melindungi hak-hak anak di Indonesia melalui Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) sebagaimana amanat dari Undang-undang Pers No.40 tahun 1999 semakin menghadapi tantangan besar. Terutama di era modern pasca semakin majunya media digital sebagai saluran teknologi dalam penyebaran dan penerimaan informasi kepada publik. Dikutip berdasarkan data yang dihipun dari laman resmi dewanpers.or.id, laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terdapat sejumlah 11.016 kasus kekerasan seksual telah terjadi pada tahun 2022. Jumlah tersebut diantaranya berkaitan dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 kasus. Tidak hanya kekerasan seksual, terdapat sejumlah anak mengalami berbagai kekerasan lain, tidak hanya secara fisik, tapi juga psikis mulai dari kasus penelantaran, perdagangan orang, sampai dengan kasus eksploitasi.¹

Berdasarkan hasil penelitian, kendati media terkadang masih erat kaitannya dengan ekonomi politik media, namun media masih meletakkan komponen pembingkai (*framing*) masing-masing, proses pembingkai tersebut tentu berasaskan demokrasi jujur dan adil. ([Intan et al., 2025](#)). Perkembangan teknologi informasi saat ini membuat kerja redaksi harus beradaptasi, berbeda dengan pola kerja redaksi ketika era media massa konvensional tidak berbasis digital maupun internet yang memiliki daya jangkauan lebih luas dan cepat.

Namun tidak sedikit dimana terkadang kerja redaksi luput dalam melindungi hak-hak anak melalui implementasi PPRA, sehingga pada praktiknya tidak jarang pemberitaan kekerasan anak di media daring belum begitu memperhatikan regulasi berkaitan dengan PPRA tersebut, terlebih pemberitaan terkait kasus kekerasan terhadap anak harus memegang prinsip kehati-hatian sebagai upaya perlindungan anak. ([Mustika & Pranawati, 2004](#)). Kemajuan teknologi informasi ini tentu diampolifikasi oleh para pelaku di industri pers, yang tadinya *core business*-nya di media cetak, radio konvensional maupun televisi analog, hari ini industri media melakukan konvergensi, berbondong-bondong hijrah dari media konvensional ke media digital berbasis internet.

Upaya ini sudah tercermin pada industri pers di Indonesia, mulai dari media yang awalnya bergerak di media konvensional seperti koran atau majalah cetak, televisi maupun radio analog saat ini sudah melakukan konvergensi ke platform media digital berbasis internet. Pun demikian dengan kecenderungan khalayak yang sudah dominan memanfaatkan platform media digital seperti Perusahaan media Koran Pikiran Rakyat yang kini memiliki platform media digital berjejaring Pikiran Rakyat Media Network, Grup Kompas Gramedia, Radio Ardan yang bergerak di Radio Streaming, Media TV One yang juga beroperasi di platform digital dan media sosial seperti website, youtube, Instagram, dan platform media digital populer lainnya. Situasi tersebut tentu berimplikasi pada suatu informasi lebih mudah dan cepat dikirim dan diterima oleh publik, membuat suatu isu yang beredar sangat mudah menjadi diskursus dan cepat melahirkan opini publik.

¹ <https://jdih.dewanpers.or.id/dokumen/peraturan/seruan-dewan-pers-tentang-ketaatan-terhadap-pedoman-pemberitaan-ramah-anak>

Namun tantangan lainnya, kecepatan pengiriman dan penerimaan informasi di era digital ini masih perlu diimbangi dengan kompetensi publik dalam literasi media, mulai dari memahami dan berkomitmen untuk tidak menyebarkan informasi bohong (hoax), hingga bisa menyaring informasi atau berita-berita yang belum tentu benar atau hoax. Agenda media massa tidak sedikit menjadi pemantik terhadap lahirnya suatu kebijakan maupun ketetapan hukum suatu kasus, publik saat ini tidak asing dengan istilah *“no viral no justice”*. Itu menjadi gambaran bagaimana isu publik yang dipicu informasi di ruang publik virtual atau media bisa mendorong arah kebijakan, misalnya kebijakan pemerintah atau penanganan kasus hukum.

Bulan Juni 2025, media di Garut gencar memberitakan isu kekerasan dan pelecehan yang melibatkan anak-anak sebagai korban maupun pelaku di Kabupaten Garut, Radar Garut menjadi salah satu media yang turut menyoroti kasus tersebut. Dampak dari isu mulai dari perundungan di sekolah, pelecehan hingga bunuh diri yang kemudian informasi tersebut menjadi sorotan dan dimuat di media, pada akhirnya membuat Masyarakat gerah dan mempertanyakan peran pemerintah dalam mewujudkan daerah ramah anak.

Radar Garut merupakan media lokal yang terbit di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat melalui berbagai platform, mulai dari platform koran, website dan media sosial dengan tim Redaksi yang memiliki pola kerja yang sistematis. Sebagai media lokal di Garut, media Radar Garut menjadi salah satu media yang aktif dalam memuat berita setiap harinya, tidak hanya menginformasikan tetapi juga tidak sungkan menjadi media edukasi bahkan kontrol sosial melalui judul, narasi, foto bahkan video yang mengandung kritik atas kinerja Pemerintah dari level bawah hingga paling tinggi sebagai pemegang kebijakan penggunaan APBD di Garut, termasuk diantaranya terkait isu atau permasalahan-permasalahan yang menyangkut hak-hak anak di Kabupaten Garut.

Penelitian terdahulu mengenai agenda setting yakni penelitian yang berjudul *Agenda Setting: Eksplorasi Pada Komunikasi Massa*. Jurnal ini meneliti terkait peran agenda setting media dalam perubahan sosial di tatanan Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini, Agenda setting media bisa mendorong beragam perubahan sosial di tatanan Masyarakat mulai dari lahirnya kebijakan baru, adanya alternatif di tengah ketidakpastian, hingga lahirnya pemimpin baru. ([Shabira, 2021](#)). Penelitian terdahulu lainnya yakni jurnal dengan judul *Opini Publik Berdasarkan Teori Agenda Setting Pada Proses Perencanaan Pemindahan IKN*. Jurnal ini meneliti tentang bagaimana media sosial berperan dalam penggiringan opini pada proses rencana pemindahan Ibu Kota Nusantara. Berdasarkan hasil penelitian ini, agenda setting media punya peranan dalam membentuk opini publik di platform media sosial Twitter terkait pemindahan IKN. ([Nadia Istamala et al., 2024](#))

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memiliki tujuan penelitian. Pertama, untuk mengetahui agenda media di Garut dalam pemberitaan ramah anak di Garut. Kedua, untuk mengetahui media di Garut menyelaraskan pemberitaan ramah anak dengan agenda publik Ketiga, untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut setelah media di Garut memuat pemberitaan ramah anak di Garut.

Metode

Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan kasus tunggal. Penelitian melibatkan satu situs dan subjek penelitian dengan menganalisis beragam permasalahan yang terjadi pada situs itu. Pada penelitian ini mengurai dan menjelaskan secara menyeluruh mengenai Agenda Setting Media di Garut dalam Pemberitaan Ramah Anak pada tahun 2025. Dalam memperoleh sumber informasi pada kasus ini, Peneliti mencari informasi dari berbagai sumber informasi data yang berkaitan tentang subyek yang diteliti

meliputi wawancara, survei, penelaahan dokumen serta data lainnya untuk menguraikan kasus secara rinci.

Untuk menggali informasi mendalam, peneliti mengambil 3 (tiga) informan untuk diwawancarai, Informan Pertama ialah Iqbal Gojali selaku Pemimpin Redaksi Media Radar Garut dan Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Garut, Feri Citra Burama selaku Redaktur Radar Garut, dan Rizki Peratami selaku Wartawan lapangan di media Radar Garut. Informan penelitian yang digali informasinya telah dipastikan merupakan seseorang yang memiliki banyak informasi (data) tentang objek penelitian ini. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, kantor Graha Pena Radar Garut yang menjadi tempat kerja redaksi media Radar Garut dalam memproduksi berita yang kemudian dimuat dalam berbagai platform.

Data Primer didapat langsung melalui proses observasi, wawancara dengan narasumber atau informan yang dinilai mampu memberikan informasi relevan dan sebenarnya di lapangan. Sementara untuk data pendukung (sekunder) diambil dari literatur, dokumen dan data yang diambil dari redaksi Radar Garut, Ahli Media, Praktisi, bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian. Setelah pengumpulan data, peneliti kemudian menganalisa data yang didapat dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Keabsahan data kemudian diuji oleh peneliti dengan melakukan validitas internal (*credibility*), validitas eksternal (*transferability*), reliabilitas (*dependability*), dan objektivitas (*confirmability*).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sub 1 Agenda Media Radar Garut dalam Pemberitaan Ramah Anak

Hasil wawancara dengan redaksi Radar Garut menjadi instrument pertama dalam studi kasus ini untuk mengetahui proses pembuatan pemberitaan ramah anak di Garut. Mereka adalah Iqbal Gojali (Pemimpin Redaksi Radar Garut), Feri Citra Burama (Redaktur Radar Garut), Rizki Peratami (Wartawan Radar Garut). Untuk instrumen berikutnya, peneliti mengambil tiga berita dari radargarut.id untuk diobservasi. Berita-berita yang dipilih merupakan berita terkait dengan isu-isu masalah anak yang muncul dari bulan Juli 2025 hingga Agustus 2025. Judul berita yang dipilih bisa dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1.

Hari dan Tanggal	Waktu	Judul Berita
Minggu, 10 Juli 2025	23.51	<i>Kasus Pencabulan Masih Terjadi di Garut, Pengamat Pendidikan Dorong Penguatan Satgas</i>
Minggu, 10 Juli 2025	13.25	<i>Dikritik Tidak Ramah Anak, Wabup Garut Putri Karlina Tanggapi Begini</i>
Senin, 25 Agustus	10.01	<i>Kasus Perundungan di SMAN 6 Garut, Ini Hasil Investigasi yang Didapatkan</i>

Sumber: Hasil Temuan Peneliti di Radar Garut

Berdasarkan hasil analisis menggunakan studi kasus, media Radar Garut sangat memandang penting isu-isu yang menyangkut permasalahan anak baik yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, pelecehan terhadap anak serta isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak anak lainnya.

Media Radar Garut mengambil *angle* secara profesional dengan memilih dan memilah narasumber yang memiliki kapastias di bidangnya dengan berimbang. Namun disisi lainnya, pemberitaan-pemberitaan yang didorong untuk berkaitan dengan hak-hak anak lebih dikedepankan dibandingkan memblowup siapa anak yang menjadi pelaku maupun korban. Sehingga kerja redaksi lebih mendorong untuk perbaikan situasi dan kondisi yang terjadi, bukan pada menghakimi anak-

anak baik yang menjadi pelaku atau menginterogasi anak yang menjadi korban.

Pimpinan Redaksi Radar Garut Iqbal Gojali menekankan agar luaran berita yang dimuat Radar Garut tidak boleh menghakimi anak-anak, apalagi merampas hak anak sebagaimana dilindungi UU Pers No.40 tahun 1999, serta ditegaskan dalam Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) mulai dari tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi korban hingga tidak memuat wajah anak-anak yang terlibat dalam masalah.

Isu terkait kekerasan dan pelecehan seksual di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat menghangat pada sekira bulan Juni 2025 setelah beberapa video viral terkait aksi perundungan anak di sekolah, tidak hanya disitu kasus yang melibatkan anak-anak Kembali terjadi setelah adanya aksi bunuh diri seorang siswa di salah satu SMAN di Kabupaten Garut. Publik bereaksi atas isu dugaan kekerasan dan pelecehan terhadap anak yang terjadi di Garut. Beragam rasa marah, sedih, perihatin terhadap peristiwa yang terjadi sampai mempertanyakan peran pemerintah semakin meningkat intensitas seiring adanya pemberitaan tersebut, salah satu luapan emosi warga yang terpotret yakni banyaknya komentar yang disematkan warga pada muatan berita yang juga diposting di media sosial Radar Garut yang kemudian merembet ke berbagai macam harapan agar masalah serupa tidak Kembali terjadi di daerah yang memiliki jumlah pondok pesantren terbanyak di Jawa Barat. Isu tersebut kemudian menjadi bahan pemberitaan lanjutan di sejumlah media atau kita kenal *Running News*, termasuk media lokal harian Radar Garut yang memiliki sejumlah platform meliputi Website, Media Sosial hingga Platform media konvensional Koran. Kondisi ini membuat Masyarakat mempertanyakan peran Pemerintah Kabupaten karena berbagai program keluarga berencana hingga program pemerintah yang berkaitan dengan urusan anak belum dirasa efektif dan sejauh ini sikap pemerintah masih dirasa kurang dan perlu peningkatan dalam aspek kualitas dan kuantitas melalui kebijakan-kebijakan yang terarah dan tepat sasaran.

Redaksi media menangkap peristiwa itu sebagai isu publik yang memiliki nilai berita (*news value*) dan penting untuk diketahui oleh masyarakat umum dan pemegang kebijakan, maka dari itu permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan keterlibatan anak-anak menjadi salah satu informasi yang layak untuk diliput dan diolah dan diproduksi menjadi berita, saking pentingnya isu tersebut bahkan media melakukan penayangan berita isu permasalahan anak-anak yang dikemas dengan pedoman pemberitaan ramah anak dengan berkelanjutan atau secara *running* dalam kurun waktu satu sampai dengan dua bulan lamanya.

News Value tidak hanya menjadi acuan redaksi memilih suatu peristiwa tersebut layak diliput dan dijadikan berita atau tidak, namun nilai berita itu dipakai redaksi dalam mengidentifikasi kriteria ketika memprioritaskan berita. (Nurhidayah & Wahyunengsih, 2023). Peristiwa kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Garut dijadikan agenda media sebagai bagian dari fungsi menginformasikan, mengedukasi hingga melakukan kontrol sosial terhadap Pemerintah, diantaranya Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Provinsi Jawa Barat.

Proses agenda media dengan pendekatan pemberitaan ramah anak dimulai dengan melakukan riset isu terlebih dahulu mulai dari mengumpulkan informasi awal yang diperoleh tim redaksi namun belum terkonfirmasi kebenarannya, kemudian untuk memverifikasi informasi tersebut tim redaksi menerjunkan wartawan ke lapangan yang dibekali proyeksi dari Redaktur sebagaimana hasil Rapat Redaksi bersama Pimpinan Redaksi untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut. Kemudian setelah informasi bahwa benar adanya kekerasan dan pelecehan yang melibatkan anak-anak di Kabupaten Garut maka redaksi mulai menyusun agenda.

Penyusunan agenda media di Garut terkait isu yang melibatkan anak-anak dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, implementasi hingga

evaluasi untuk pemberitaan liputan khusus yang berkaitan dengan tema pemberitaan ramah anak di beberapa platform yang dimiliki mulai dari website, media sosial hingga koran cetak dengan mempertimbangan aspek kode etik jurnalistik serta Pedoman Pemberitaan Ramah Anak sebagaimana diberlakukan Dewan Pers di Indonesia.

Tim Redaksi Media mulai memetakan isu tersebut dengan memastikan informasi yang didapat wartawan di lapangan dan kemudian dikirimkan ke meja redaksi sangat kaya akan nilai berita, bisa memberikan titik terang terkait informasi peristiwa yang berdasarkan fakta sebenarnya, serta meluruskan informasi yang sempat menjadi simpang siur di publik. Selanjutnya, tim redaksi yang dipimpin koordinator liputan atau redaktur menyiapkan fokus dalam mengkurasi setiap artikel berita yang dikirim wartawan, atau bisa kita kenal dengan istilah proses *gatekeeping*.

Wartawan yang terjun ke lapangan untuk menggali informasi terkait isu yang menjadi agenda media sudah dibekali proyeksi untuk menggali isu tersebut mulai dari apa yang terjadi, dimana peristiwa tersebut terjadi, kapan, bagaimana kronologi suatu peristiwa terjadi, siapa pihak yang diduga terlibat, hingga kenapa peristiwa kekerasan dan pelecehan terhadap anak maupun dilakukan oleh anak itu bisa terjadi. Dalam proses produksi redaksi tentang pemberitaan ramah anak pada agenda media Radar Garut, tim redaksi mulai dari level Wartawan, Redaktur sampai Pemimpin Redaksi membagi tugas untuk melaksanakan liputan khusus terkait isu tersebut. Agenda Media disusun melalui manajemen redaksi Radar Garut melalui proses *planning, organizing, actuating* sampai dengan *controlling*.

Manajemen merupakan rangkaian proses dengan tujuan untuk mencapai apa yang ditargetkan melalui upaya perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pelaksanaan (*Actuating*) dan pengendalian (*Controlling*) yang dijalankan dengan cara sistematis. (Neni utami et al., 2023). Dalam produksi berita yang berkaitan dengan kasus kekerasan dan pelecehan terhadap anak, redaksi di Radar Garut tidak hanya sebatas untuk memberitakan dalam konteks menginformasikan (*to inform*) saja sebagaimana fungsi media dalam komunikasi massa, tetapi media melihat kasus ini sebagai bagian dari kelalaian dalam manajemen Pemerintah dalam mengurus urusan Masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan dan keselamatan anak dalam perspektif Pendidikan, Sosial, Kesehatan, Kesejahteraan bahkan hingga aspek Hukum. Maka dari itu, media Radar Garut dalam hal ini menetapkan bahwa agenda media dalam pemberitaan kasus pelecehan dan kekerasan terhadap anak atau oleh anak sebagai bagian dari kontrol sosial. Media sebagai bagian dalam kontrol sosial merupakan amanat Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers pada pasal 3 ayat 1 menjelaskan, bahwa pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.²

Dalam proses peliputan, wartawan melakukan konfirmasi, verifikasi data dan fakta yang didapat sebagai upaya dalam melahirkan pemberitaan yang terverifikasi dan berimbang (*cover both side*).

Sejalan dengan proses pengumpulan data dan fakta pada pelaksanaan peliputan pemberitaan ramah anak, dalam proses tersebut wartawan juga sekaligus melakukan advokasi terkait dengan kasus-kasus yang menimpa anak terutama antara korban terhadap pemerintah atau pemegang kebijakan. Dalam hal ini biasanya pihak yang memiliki kewenangan akan lebih *aware* dengan kasus-kasus atau isu yang berkaitan dengan permasalahan anak-anak di Kabupaten Garut yang tengah digarap oleh media di Garut. Agenda Setting sendiri memang menggambarkan peran sangat penting media dalam penyaringain dan pemilihan berita untuk informasi kepada publik, sehingga Ketika media memberikan penekanan terhadap isu yang disitu terdapat agenda pemberitaan ramah anak dengan intensitas dan berbagai macam sudut pandang maka publik maupun

² https://www.dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/2305300342_Buku_Saku_Dewan_Pers_Cet_-18_2023.pdf

pemegang kebijakan hingga *stakeholders* lain akan menganggap suatu isu yang tadinya dirasa tidak terlalu penting menjadi sangat penting.

Diantara contoh konkrit yang dilakukan redaksi Radar Garut yakni pada kasus bunuh diri seorang siswa salah satu SMAN di Garut yang diduga terjadi karena adanya perundungan. Ketika informasi itu didapat, redaksi media mulai menyusun langkah dalam mencari fakta dan data karena pada saat itu beredar informasi yang beragam, maka untuk memastikan kebenaran informasi berdasarkan data dan fakta maka tim redaksi Radar Garut diterjunkan untuk mengkonfirmasi mulai dari pihak keluarga, rekan korban, pihak sekolah sampai pemegang kebijakan dari Dinas Pendidikan hingga Kepala Daerah. Setelah informasi dan data terkumpul, redaksi Radar Garut memilah informasi yang akan dijadikan berita dan dimuat di multiplatform media.

Dalam agenda media disini, dari pemberitaan yang berkaitan dengan kekerasan yang melibatkan anak-anak dalam hal ini redaksi tidak hanya mengacu pada tujuan agar mendapat *traffic* atau penjualan oplah koran dari pembaca, melainkan memasukkan asas pemberitaan ramah anak. Media punya keleluasaan dalam menyampaikan berita dengan tetap mengedepankan asas kepedulian dan empati terhadap anak melalui proses pembingkai berita, mulai dari pembuatan judul, narasi, pemilihan foto, audio maupun video.

Dewan Pers telah menekankan terhadap pers di Indonesia untuk taat pada Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang tertuang dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/PeraturanDP/II/2019, ialah pedoman pemberitaan yang dihasilkan oleh komunitas pers. Aturan tersebut diluncurkan selain menjaga agar pers tetap bekerja dalam koridor kode etik jurnalistik, pers pun turut melindungi hak-hak anak. (jdih.dewanpers.or.id)³

Mengingat adanya regulasi tersebut yang mengatur pers di Indonesia, maka redaksi dalam implementasi pemberitaan ramah anak turut mempertimbangan beberapa aspek mulai dari: Pertama, menekankan agar wartawan maupun institusi media merahasiakan identitas anak dalam memuat berita tentang anak baik itu yang masih dalam tahap dugaan, sangkaan, dakwaan atau bahkan terhadap anak yang telah dipastikan melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya. Kedua, media memuat berita yang telah terverifikasi dalam segi fakta dengan dengan judul, narasi berita, foto, video yang bernuansa positif, penuh empati, dan/atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistik. Ketiga, redaksi media tidak mengungkapkan identitas pelaku kejahatan kekerasan atau pelecehan seksual terhadap atau oleh anak. Jika setelah proses evaluasi terhadap pemberitaan dinilai terjadi kelalaian, maka redaksi media akan senantiasa segera melakukan ralat atau mengedit, hapus (*take down*) konten berita di berbagai platform yang dinilai melanggar pedoman pemberitaan ramah anak.

Implementasi pemberitaan ramah anak ini tidak hanya sebagai bagian dari komitmen redaksi dalam mematuhi regulasi Undang-undang Pers No.40/1999, melainkan sebagai wujud tanggung jawab sosial dalam rangka membangun lingkungan yang ramah terhadap anak. Sehingga dalam setiap pemberitaan yang berkaitan dengan kekerasan atau pelecehan dan ada keterlibatan anak-anak, maka redaksi media akan senantiasa mengikuti pedoman pemberitaan ramah anak terlebih media memiliki otoritas dalam hal *gatekeeping* maupun *framing*. Hal tersebut tercermin dalam pemilihan narasumber yang berimbang, *angle* berita, judul, narasi, foto hingga video yang dimuat dalam multiplatform media yang berusaha memposisikan sebagai media yang punya keberpihakan terhadap hak-hak dan kepentingan anak. Misalnya dalam satu kasus, alih-alih mengorek siapa anak-anak yang terlibat dalam satu kasus kekerasan atau pelecehan, media lebih memilih

³ <https://jdih.dewanpers.or.id/dokumen/peraturan/seruan-dewan-pers-tentang-ketaatan-terhadap-pedoman-pemberitaan-ramah-anak>

dalam mengadvokasi agar kasus tersebut tidak terulang, tidak menimbulkan masalah lebih besar hingga mengarahkan pemberitaan yang mendorong terhadap kesadaran publik dan pemegang wewenang agar dalam suatu permasalahan tersebut melahirkan Solusi jangka pendek, menengah dan panjang serta memberi hikmah, berdampak positif dan luas. Hal ini bisa dilakukan karena pada hakikatnya redaksi media pun memiliki otoritas dalam melakukan proses *gatekeeping* maupun *framing*.

Aspek-aspek yang turut berperan dalam mendorong proses *gatekeeping* di suatu media itu sendiri yakni mulai dari dorongan di level individual, level rutinitas media, level organisasi, level ekstramedia, dan level sistem sosial. (Wulandari, 2020). Kendati terkadang dalam praktiknya tidak luput dari kesalahan seperti ada kurang teliti dalam mengedit gambar, atau kurangnya sensor dalam pemberitaan, namun hal-hal yang berpotensi merugikan hak anak tersebut segera dilakukan mitigasi dengan melakukan koreksia atau ralat, bahkan bisa sampai *take down* berita.

Secara metodologis, framing menurut Pan dan Kosicki (1993) dijelaskan melalui pendekatan struktural, dengan membagi framing dalam empat unsur tekstual yakni Pertama, Struktur sintaksis terkait dengan penyusunan kalimat dan tata bahasa. Kedua, Struktur skrip, menerangkan bagaimana peristiwa disusun secara naratif. Ketiga, Struktur tematik, yang menggambarkan organisasi makna berita. Keempat, Struktur retorik, yakni pemilihan diksi, gaya visual, dan elemen persuasif lainnya. (Puspa Izzati Annisa, 2025). Media mampu mentransfer agenda media terhadap khalayak dan pemegang kebijakan yang belajar mengenai isu atau permasalahan-permasalahan yang terjadi setelah media menyiarkan berita kepada publik melalui penting topik yang dimuat pada *headlines* multiplatform media Radar Garut.

Dalam penerapan pedoman pemberitaan ramah anak ini bukan berarti mengesampingkan hak-hak pihak lain seperti tetap menjaga hak orang dewasa, tetap menjaga hak Perempuan atau tetap menjaga hak-hak pihak-pihak yang memang memiliki hak dalam urusan tertentu sebagaimana diatur dalam aturan-aturan yang berlaku di tatanan masyarakat.

Jujur dengan cara tidak mengubah fakta dari suatu peristiwa yang ditemukan di lapangan atau fakta sebagaimana disampaikan oleh narasumber tidak cukup menjadi aspek pembenaran wartawan dalam pemberitaan, namun juga perlu dilengkapi dengan mengedepankan akurasi. Informasi yang akurat dan jelas, tidak menyulut kontroversi publik menjadi bagian penting dalam standar etik wartawan, selain standar operasional dan profesional wartawan. (Rivaldi et al., 2022)

Sehingga, implementasi kerja redaksi media ramah anak ini dilakukan untuk mendorong hak-hak anak dan media punya keberpihakan terhadap anak-anak di Garut, tetapi tetap menjunjung asas-asas yang berhubungan dengan Kode Etik Jurnalistik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pers No.40 tahun 1999. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga pers sebagai Lembaga yang netral dan objektif dalam menginformasikan kepada khalayak luas.

Sub 2 Agenda Publik dalam Pemberitaan Ramah Anak

Pemberitaan ramah anak yang dimuat media tentu sangat memperhatikan dan mempertimbangkan agenda publik, dalam hal ini isu yang dimuat juga menggambarkan apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan aspek lainnya yang berkaitan dengan kepentingan anak tentu menjadi salah satu urusan penting di tatanan masyarakat. Agenda media yang dilakukan redaksi media Radar Garut pada akhirnya mendorong interaksi publik untuk lebih peduli terhadap suatu isu atau permasalahan yang sedang terjadi.

Dalam satu kasus pemberitaan terkait kekerasan terhadap anak di Garut, pada saat terjadi satu kekerasan belum banyak publik atau pemegang kebijakan

yang tahu terhadap isu tersebut maka kejadian itu tidak terlalu mendapat perhatian dari banyak pihak. Kepala dinas atau wakil rakyat atau bahkan kepala daerah, lingkungan sekitarnya pun seperti sekolah belum terlalu menganggap permasalahan itu sebagai masalah besar dan terkesan hanya sebagai angin lalu dan dibiarkan begitu saja tanpa adanya solusi yang berarti. Ketika media melakukan penekanan berita melalui agenda media terhadap suatu isu yang seharusnya menjadi perhatian dan kepentingan publik dengan memastikan data dan fakta, melakukan verifikasi, *cover both side* hingga mengadvokasi permasalahan yang terjadi. Maka biasanya media Radar Garut akan meningkatkan intensitas pemberitaan dengan kualitas dan masif. dengan tetap mengindahkan nilai-nilai kode etik jurnalistik berikut pedoman pemberitaan ramah anak, maka publik menjadi terdorong untuk lebih peduli dan perhatian terhadap permasalahan tersebut.

Penekanan berita dilakukan mulai dengan pemilihan judul yang menginformasikan telah terjadi kasus yang berkaitan dengan hak-hak anak, kemudian berita yang informasinya sudah terkonfirmasi selanjutnya disusun dalam narasi yang lebih menekankan terhadap rasa peduli dan empati terhadap hak-hak anak sebagai implementasi media dengan mengedepankan konsep pemberitaan ramah anak, terutama menyangkut korban anak-anak. Penekanan diperkuat dengan foto, audio dan video yang bisa memperkuat judul dan narasi berita yang disampaikan. Pemberitaan ramah anak diwujudkan dengan memuat permasalahan yang terjadi terhadap anak-anak dengan agenda mendorong khalayak bukan pada arah menjustifikasi anak-anak yang menjadi korban ataupun pelaku, melainkan pembangunan opini publik melalui pemilihan judul, narasi, foto, audio bahkan video yang dimuat lebih mengarah terhadap bagaimana agar permasalahan ini mendapatkan jalan keluar atau solusi dalam menciptakan lingkungan ramah anak yang menjadi bagian dari agenda publik selama ini.

Erikson, Lutber, dan Tedin juga mengemukakan empat tahap pembentukan opini publik, yakni: Pertama, munculnya isu yang dirasakan sangat relevan bagi kehidupan orang banyak. Kedua, Isu tersebut relative baru sehingga memunculkan kekaburan standar penilaian atau standar ganda. Ketiga, *Opinion leaders* yang juga tertarik dengan isu tersebut, seperti politisi dan akademisi. Keempat, Mendapat perhatian pers sehingga informasi dan reaksi terhadap isu tersebut diketahui khalayak. (Nurrafi et al., 2021). Pedoman yang diimplementasikan pada pemberitaan di media pada akhirnya memberi aspek manfaat yang tidak hanya menginformasikan (*to inform*), tetapi juga memberi manfaat dalam mengedukasi (*to educate*) dan kontrol sosial (*social control*) terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Konsep pemberitaan yang dibangun media mulai dari memuat berita-berita dengan mengedepankan pedoman pemberitaan ramah anak, disertai komitmen wartawan, redaktur hingga pemimpin redaksi dalam mengoptimasi nilai berita di setiap konten berita yang dimuat dengan menyesuaikan dengan agenda publik.

Nilai berita meliputi hal-hal pemberitaan yang berkaitan dengan Fakta, Kedekatan (*Proximity*), Pengaruh (*Magnitude*), Aktualitas (*Timeliness*), Penting (*Significance*), Dampak (*Impact*), Ketokohan (*Prominence*). (Taya & Irmawati, 2023).

Agenda publik semakin menguat ketika terbangun opini publik setelah masyarakat belajar dari apa yang diberitakan media terkait isu atau kasus-kasus yang berkaitan erat dengan nilai-nilai kepedulian dan empati terhadap hak-hak anak melalui intensitas pemberitaan yang cukup tinggi dengan menjunjung tinggi asas-asas pedoman pemberitaan ramah anak dengan tetap menuangkan nilai-nilai berita (*news value*) pada setiap konten berita yang dimuat media, salah satunya melalui media Radar Garut.

Semakin banyak nilai berita dalam pemberitaan-pemberitaan terkait isu keberpihakan terhadap anak, maka biasanya kecenderungan publik atas perhatian

terhadap isu-isu tentang anak akan lebih kuat bahkan ramai atau viral. Isu yang sampai ke publik menjadi bahan perbincangan di sejumlah kalangan masyarakat mulai dari masyarakat bawah, menengah maupun atas di berbagai tempat mulai di lingkungan pengajian, lingkungan sekolah, di tempat nongkrong, tempat kerja, pasar, café-café dan menjadi perbincangan orang-orang di sejumlah ruang publik lainnya.

Beberapa berita lanjutan dari kasus yang berkaitan dengan masalah hak anak diantaranya berita di Radar Garut dengan judul “Kasus Pencabulan Masih Terjadi di Garut, Pengamat Pendidikan Dorong Penguatan Satgas”⁴, Kasus Perundungan di SMAN 6 Garut, Ini Hasil Investigasi yang Didapatkan⁵, Sekolah Harus Gencarkan Home Visit, Ahab: Pendidik Harus Lebih Dekat dengan Siswa Bahkan Orang Tua⁶, Penyandang Disabilitas di Garut Jadi Korban Kekerasan Seksual, Yudha Dorong Pemkab Ambil Langkah Serius⁷.

Isu terkait pentingnya membangun lingkungan atau daerah layak anak kembali menjadi bahasan penting pada setiap elemen di masyarakat, pada pertengahan tahun 2025 sekira bulan Juni, Juli, Agustus 2025 publik mulai dari masyarakat umum, pemerhati kebijakan, akademisi, hingga anggota legislatif dan sejumlah pihak lainnya di Kabupaten Garut kian gencar menyuarakan agar pemegang wewenang bisa meningkatkan peranan dalam mewujudkan daerah layak anak mulai dari lingkungan umum, sekolah, perkantoran dan titik-titik rawan terjadinya kejahatan yang melibatkan anak-anak baik sebagai korban maupun pelaku. Gambaran dari semakin menguatnya agenda publik terkait isu-isu yang berhubungan dengan keselamatan anak, perlindungan anak-anak dari kekerasan maupun pelecehan seksual, perlindungan terhadap pendidikan maupun Kesehatan anak usai ramainya pemberitaan semakin mempertegas bahwasanya isu-isu berkaitan dengan hak-hak anak yang menjadi hal yang dianggap penting oleh publik sejalan dengan apa yang ditonjolkan media melalui kerja redaksi dalam melakukan *gatekeeping* maupun *framing*. Agenda publik dengan agenda media seolah seperti bola salju, semakin berputar dan dibahas maka isu dan perhatian publik terhadap permasalahan hak-hak anak akan lebih cenderung menguat dan membesar. Diantara contoh konkrit dimana masyarakat melihat pentingnya lingkungan serta kultur yang mampu mengatur dan mengimplementasikan situasi dan kondisi yang punya keberpihakan terhadap anak, mendorong sejumlah aktivis mahasiswa terutama dari kalangan Pelajar dan Mahasiswa Nahdlatul Ulama di Kabupaten Garut mendorong agar di daerahnya dibentuk Komisi Perlindungan Anak di Daerah (KPAD) Kabupaten Garut. Saking pentingnya agenda tersebut, masyarakat sampai melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut untuk bisa terwujudnya atau hadirnya Lembaga KPAD di Kabupaten Garut.

Dorongan agar terbentuknya Lembaga KPAD di Kabupaten Garut seiring dengan ramainya isu-isu yang diantaranya dibawa dalam agenda media kemudian diterima dan dipahami publik, maka permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan maupun pelecehan yang terjadi pada anak-anak di Kabupaten Garut belakangan ini menjadi bagian dari prioritas yang ingin didorong khalayak untuk diimplementasikan para pemegang kebijakan.

Sub 3 Opini Publik dan Kebijakan Pemerintah Kaitan Agenda Setting Media dalam Pemberitaan Ramah Anak

⁴ <https://radargarut.id/2025/07/20/kasus-pencabulan-masih-terjadi-di-garut-pengamat-pendidikan-dorong-penguatan-satgas/>

⁵ <https://radargarut.id/2025/08/25/kasus-perundungan-di-sman-6-garut-ini-hasil-investigasi-yang-didapatkan/>

⁶ <https://radargarut.id/2025/07/24/sekolah-harus-gencarkan-home-visit-ahab-pendidik-harus-lebih-dekat-dengan-siswa-bahkan-orang-tua/>

⁷ <https://radargarut.id/2025/08/27/penyandang-disabilitas-di-garut-jadi-korban-kekerasan-seksual-yudha-dorong-pemkab-ambil-langkah-serius/>

Seiring dengan intensitas pemberitaan media terkait isu permasalahan melibatkan anak-anak yang didorong melalui agenda media dengan menyesuaikan dengan agenda publik, proses tersebut mendorong lahirnya kebijakan pemerintah dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi dan mendapat sorotan dari media.

Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam perlindungan terhadap anak-anak serta punya kepentingan dalam memastikan daerahnya aman dan layak untuk dihuni oleh anak-anak, termasuk di Kabupaten Garut sendiri dimana pemerintah yang punya otoritas di daerah tersebut ialah Pemerintah Kabupaten Garut yang dipimpin Bupati dan Wakil Bupati Garut. Pemberitaan ramah anak yang dilakukan menjadi agenda media Radar Garut sekaligus punya relevansi serta menguatkan agenda publik pada akhirnya mendorong agenda kebijakan.

Maxwell McCombs dan Donald Shaw menjelaskan bahwa agenda setting merupakan kegiatan penekanan terhadap suatu isu yang dilakukan oleh media lantaran memiliki kepentingan dibalik pemberitaan tersebut, mulai dari agenda media, agenda publik hingga kebijakan. ([Littlejohn & Foss, 2009](#)).

[McCombs & Shaw \(1972\)](#) menjelaskan agenda media bisa dilihat dalam banyak aspek mulai dari terdapat kepentingan politik atau ideologi pada perusahaan media massa yang mendorong terhadap pembentukan pemberitaan. Pemuatan berita menjadi hasil interpretasi subjektif dari media massa yang disalurkan melalui pekerjanya seperti wartawan, redaksi maupun pimpinan redaksi. Semakin dekat aspek kepentingan tersebut dengan Masyarakat maka isu yang dibawa media akan lebih diterima publik, apalagi isu tersebut sedang populer maka penerimaannya akan semakin meningkat. Teori agenda setting sangat berkaitan dengan kekuatan media massa dalam menentukan suatu agenda dalam kontennya yang pada akhirnya mampu memberi pengaruh terhadap agenda public. ([Shabira, 2021](#))

Agenda media hingga persepsi publik mendorong agenda kebijakan itu sendiri dalam melahirkan kebijakan publik yang dianggap penting bagi publik. ([Shabira, 2021](#)).

Masifnya pemberitaan oleh media memperkuat perhatian publik yang pada akhirnya mendorong gerak pemerintah dalam menuntaskan permasalahan tersebut, setidaknya mengurangi dampak permasalahan itu agar balik menjadi lebih baik. Tidak hanya institusi setingkat Dinas yang berwenang, melainkan sampai dengan Kepala Daerah setingkat Bupati bahkan Gubernur Jawa Barat turun gunung untuk gerak cepat menyelesaikan permasalahan setelah beberapa waktu peristiwa itu terjadi dan viral di media massa, salah satunya Radar Garut. Dalam kasus ini, semakin menegaskan konsep Teori Agenda Setting bahwa media memiliki agenda sehingga bisa mendorong pada penguatan agenda publik yang turut diamplifikasi para pembuat kebijakan. Proses agenda setting sendiri meliputi agenda media, agenda publik dan agenda kebijakan. Namun temuan baru berdasarkan hasil penelitian ini, agenda setting yang meliputi agenda media, agenda publik hingga agenda kebijakan bisa diarahkan terhadap hal-hal yang lebih positif sehingga bisa mengoreksi hal-hal yang dirasa merugikan banyak pihak dengan lebih diarahkan pada hal-hal yang mampu membangun lingkungan yang lebih baik.

Pemberitaan ramah anak yang diimplementasikan media Radar Garut tidak hanya terwujud dalam pemuatan judul, narasi, foto atau video yang melindungi hak-hak anak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik yang tertuang dalam UU Pers No.40/1999 dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA), melainkan juga mendorong dalam melahirkan kebijakan yang punya keberpihakan terhadap kepentingan dan hak anak usai menilai bahwa agenda publik saat itu merupakan suatu hal yang penting dan prioritas. Korelasi agenda media dengan penguatan agenda publik menjadi dasar wartawan dalam mengadvokasi permasalahan-permasalahan yang menyangkut anak-anak kepada pemegang wewenang. Konfirmasi dan proses meminta tanggapan dari pejabat menjadi gerbang masuk

proses advokasi permasalahan-permasalahan yang melibatkan anak-anak untuk lebih didorong dalam melahirkan solusi jangka pendek, menengah hingga solusi jangka panjang.

Agenda media dan publik terkait isu-isu yang mendorong terhadap terwujudnya lingkungan ramah anak turut mendorong pemegang kebijakan, diantaranya Pemerintah Kabupaten Garut. Dalam beberapa waktu setelah insiden memilukan terkait adanya siswa bunuh diri, Pemkab Garut gencar melaksanakan sosialisasi dengan tema-tema ramah anak, anti kekerasan terhadap anak, anti perundungan di lingkungan-lingkungan yang biasa menjadi tempat beraktivitas bagi anak-anak, hingga terus gencar membangun narasi yang berkaitan dengan isu Pemerintah mendorong terwujudnya daerah Garut layak anak yang meliputi fokus pada pemenuhan hak-hak anak, membangun iklim kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak. Usai ramai kasus kekerasan terhadap anak yang kemudian mendapat sorotan media, Pemerintah Kabupaten Garut sekira bulan Agustus 2025 menegaskan komitmennya untuk serius mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA). Dalam kesempatan tersebut Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin menegaskan bahwa program KLA di Kabupaten Garut menjadi langkah strategis dalam mewujudkan lingkungan yang mendukung hak-hak anak termasuk terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengungkapkan bahwa upaya pencegahan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak menjadi aspek penting yang harus diprioritaskan oleh Pemkab Garut dan jajaran di bawahnya. Pihaknya menekankan terkait pentingnya sosialisasi dan pedoman yang jelas, seperti larangan anak dan orang dewasa berada di ruang tertutup tanpa kehadiran orang lain.⁸

Opini publik dalam menyuarakan pentingnya menjaga dan melindungi hak-hak anak juga tercermin dalam beberapa kesempatan, diantaranya disuarakan legislator asal Garut di DPRD RI, pihak yang mewakili masyarakat di parlemen dan diyakini memiliki kredibilitas dalam menyampaikan aspirasi. Dikutip dari laman nasdemdpri.id, Legislator Partai NasDem Dapil XI (Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya) Lola Nelria Oktavia yang turut mendorong agar negara dan seluruh pemangku kepentingan harus menempatkan permasalahan itu sebagai prioritas perhatian. Hal tersebut seiring tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak dan Perempuan di Kabupaten Garut serta daerah lainnya. Pihaknya menegaskan pentingnya langkah tegas dan sistematis agar peristiwa serupa tidak terus berulang.⁹

Sumber informasi yang kredibel menjadi faktor penting dalam memengaruhi pembentukan opini di media. Publik punya kecenderungan untuk percaya terhadap informasi yang disampaikan oleh sumber yang dinilai kredibel, mulai dari informasi yang disampaikan jurnalis, tokoh publik, hingga influencer. Penelitian oleh [Metzger dan Flanagan \(2013\)](#) menunjukkan dimana sumber informasi yang memiliki kredibilitas punya peran penting dalam mempengaruhi sikap dan perilaku publik yang bermedia apalagi didukung aktivitas seperti pada media sosial mulai dari bentuk *likes*, *shares*, dan *repost* punya peranan signifikan terhadap pembentukan opini. ([Metzger & Flanagan, 2013](#)) Kredibilitas penyampai informasi dengan menyesuaikan isu di atas kepentingan publik yang kemudian disebarluaskan oleh media akan lebih memiliki bobot dalam membentuk opini publik, salah satunya terkait hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak dan kepentingan anak di tengah ramainya kasus kekerasan hingga pelecehan pada kalangan anak-anak.

⁸ <https://www.garutkab.go.id/berita/bupati-garut-sampaikan-komitmen-pemkab-garut-dalam-mewujudkan-kabupaten-layak-anak>

⁹ <https://nasdemdpri.id/berita/pelaku-kekerasan-seksual-di-garut-harus-diberikan-hukuman-maksimal>

Kesimpulan

Penelitian ini telah mengkaji secara mendalam terkait Agenda Setting Media di Garut dalam Pemberitaan Ramah Anak. Isu perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai prioritas yang dibawa oleh agenda media melalui komitmen dan kerja redaksi dalam memproduksi berita dengan mempertimbangkan keberpihakan terhadap hak-hak anak sebagaimana regulasi dari pedoman pemberitaan ramah anak (PPRA) akan mendorong implementasi pemberitaan ramah anak di media. Penerapan pedoman pemberitaan ramah anak di meja redaksi dari tataran bawah, menengah sampai atas sehingga berita yang disajikan benar-benar melindungi dan mengedepankan hak-hak anak maka biasanya itu akan lebih kuat mendorong agenda publik yang sejalan dengan agenda media dimana masyarakat lebih peduli terhadap permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hak anak-anak di Kabupaten Garut. Agenda publik yang kemudian tergabung dalam opini publik dengan didukung sebaran informasi dari media memicu pada situasi dan kondisi menguatnya agenda kebijakan dari pemegang kewenangan di suatu daerah yang memiliki frekuensi yang sejalan dengan agenda media dan agenda publik dalam mewujudkan lingkungan yang layak dan ramah bagi anak-anak.

Saran

Sebagai saran, penelitian selanjutnya bisa memperluas kajian serupa dalam skop yang lebih luas seperti Tingkat Regional maupun Nasional dengan keberagaman platform media di sejumlah industri pers seperti media cetak, media televisi, radio, media website, media sosial dan berbagai platform lainnya untuk lebih mengetahui dan memahami secara mendalam dan spesifik agenda seperti apa yang benar-benar bisa mengorkestrasi seluruh pihak untuk sejalan dalam membela hak-hak anak.

Daftar Pustaka

- Eriyanto. (2007). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. LKIS.
- Intan, T., Hartiana, P., Lapalelo, P. A., & Krisdinanto, N. (2025). Media masih Pilar Demokrasi? (Jurnalisme dan Demokrasi di Bingkai Pemberitaan Pernyataan Sikap Civitas Akademika Jawa Timur tentang Pemilu 2024). *Jurnal Communio : Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, 14(1), 30–45.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2009). *Encyclopedia of Communication Theory*. California: SAGE Publications, Inc.
- Metzger, M. J., & Flanagin, A. J. (2013). Credibility and trust of information in online environments: The use of cognitive heuristics. *Journal of Pragmatics*, 59, 210–220. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2013.07.012>
- Morissan. (2015). *Teori Komunikasi : Individu Hingga Massa*. Jakarta Prenadamedia Group.
- Mustika, S., & Pranawati, R. (2004). Implementasi Panduan Pemberitaan Ramah Anak Di Tribunnews.Com. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 18(1), 87–104. <https://doi.org/10.24002/jik.v18i1.3339>
- Nadia Istamala, Nur Azizah, Oki Nurahim, & Daryono Daryono. (2024). Opini Publik Berdasarkan Teori Agenda Setting Pada Prosesperencanaan Pemindahan Ikn. *Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi*, 4(2), 74–87. <https://doi.org/10.51903/dinamika.v4i2.517>
- Neni utami, Muhammad Yoga Aditia, & Binti Nur Asiyah. (2023). Penerapan Manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating Dan Controlling) Pada Usaha Dawet Semar Di Kabupaten Blitar. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 2(2), 36–48. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v2i2.1522>
- Nurhidayah, A. R., & Wahyunengsih. (2023). News Value Analysis in Educational News on Kompas.com. *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, 4(1), 39–50. <https://doi.org/10.53429/j-kis.v4i1.683>

- Nurrafi, D., Rochmaniah, A., Studi, P., Komunikasi, I., Bisnis, F., & Sosial, I. (2021). *Public Opinion on the Pring Sewu Cultural Market in Binangun Hamlet (Opini Masyarakat terhadap Pembangunan Pasar Budaya Pring sewu di Dusun Binangun)*. 1–9.
- Nurudin, (2003). *Komunikasi Massa*, Malang: CESPUR.
- Puspa Izzati Annisa. (2025). Analisis Framing Pemberitaan Afif Maulana di Instagram Narasinewsroom. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 239–253. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v4i2.4341>
- Rivaldi, M. F., Hidayat, D. R., & Supriadi, D. (2022). Disiplin Verifikasi Wartawan Tribunnews.com dan Detik.com dalam Pemberitaan Penganiayaan Ratna Sarumpaet. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 5(2), 160. <https://doi.org/10.24198/jkj.v5i2.31701>
- Shabira, F. (2021). Agenda Setting: Eksplorasi Pada Komunikasi Massa. *JKOMDIS: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*, 1(1), 26–37. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.vii1.5>
- Taya, L., & Irmawati. (2023). Unsur dan Nilai Berita Dalam Proses Pemilihan Halaman Beranda TRIBUNNEWSSULTRA.COM. *CORE: Journal of Communication Research*, 1(2), 1–11. e-issn: 2985-6639
- Wulandari, T. E. (2020). Proses Gatekeeping Radar Sulteng Dalam Menyajikan Pemberitaan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala. *Kinesik*, 7(2), 195–204. <https://doi.org/10.22487/ejk.v7i2.122>

Website

- https://www.dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/2305300342_Buku_Saku_Dewan_Pers_Cet_-18_2023.pdf
- <https://www.garutkab.go.id/berita/bupati-garut-sampaikan-komitmen-pemkab-garut-dalam-mewujudkan-kabupaten-layak-anak>
- <https://jdih.dewanpers.or.id/dokumen/peraturan/seruan-dewan-pers-tentang-ketaatan-terhadap-pedoman-pemberitaan-ramah-anak>
- <https://nasdemdpri.id/berita/pelaku-kekerasan-seksual-di-garut-harus-diberikan-hukuman-maksimal>
- <https://radargarut.id/2025/07/20/kasus-pencabulan-masih-terjadi-di-garut-pengamat-pendidikan-dorong-penguatan-satgas/>
- <https://radargarut.id/2025/08/25/kasus-perundungan-di-smn-6-garut-ini-hasil-investigasi-yang-didapatkan/>
- <https://radargarut.id/2025/07/24/sekolah-harus-gencarkan-home-visit-ahab-pendidik-harus-lebih-dekat-dengan-siswa-bahkan-orang-tua/>
- <https://radargarut.id/2025/08/27/penyandang-disabilitas-di-garut-jadi-korban-kekerasan-seksual-yudha-dorong-pemkab-ambil-langkah-serius/>